

SKRIPSI

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN, KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENERAPAN
AKRUAL BASIS TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KAB.KEP. SELAYAR**

Oleh

WIDYA AMRIANI

NIM 105730502714



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN, KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENERAPAN
AKRUAL BASIS TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KAB.KEP. SELAYAR**

SKRIPSI

Oleh

WIDYA AMRIANI

NIM 105730502714

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1
Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Sukirman Dan Ibunda Hermawati, Serta Orang - Orang Yang Sudah Banyak Membantu Baik Dalam Menyemangati, Mendorong Serta Mendoakan Kesuksesanku Dari Segi Materi Maupun Non-Materi

MOTTO HIDUP

Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi.

(Conan O' Brien)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Selayar"

Nama Mahasiswa : Widya Amriani
No. Stambuk/NIM : 105730502714
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan di ujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (1) pada tanggal 27 Oktober 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 27 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Amril, SE., M.Si. Ak.CA
NIDN. 0020087606

Pembimbing II,

Samsul Rizal, SE., M.Si
NBM. 090728901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **WIDYA AMRIANI**, NIM : **105730502714**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0198/2018 M, Shafar 1440 H/27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Shafar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum: Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Edi Jusriadi, SE., MM (.....)
2. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....)
3. Sitti Suleha, S.Pd., M.Si (.....)
4. Samsul Rizal, SE., MM (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Amriani
Stambuk : 105730502714
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Selayar".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



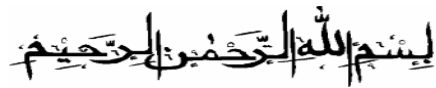
Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi,


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Selayar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sukirman dan ibu Hermawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan kakek nenek tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Muh. Amril, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Samsul Rizal, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 1 september 2018

Penulis

ABSTRAK

WIDYA AMRIANI, 2018. Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Selayar, Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Amril dan pembimbing II Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 1) Pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar 2) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar 3) Penerapan akrual basis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar.

Kata Kunci : *Akuntansi keuangan daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan.*

ABSTRACT

WIDYA AMRIANI, 2018. The influence of internal supervision, the quality of human resources and the application of basic accrual to the financial report of Kep. Selayar government, the accounting thesis of the economics and business faculty of University Muhammadiyah Makassar. Supervised by supervisor Amril and Samsul Rizal.

This study aims to determine the effect of internal supervision, the quality of human resources and the application of basic accrual to the financial report of Kep. Selayar government. The type of research used in this study is multiple regression analysis. Based on the result of the analysis it can be concluded that : 1). Internal supervision affects to the quality of the Kep. Selayar government financial report. 2). The quality of human resources influences the quality of the district government financial reports of Selayar. 3). The application of basic accrual affects the quality of the financial report of the Selayar government.

Keywords : *regionally financial accounting, human resource competencies, internal control systems, quality of financial report.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
1. Pengawasan Intern	7
2. Kualitas Sumber Daya Manusia.....	8
3. Penerapan Akrual Basis.....	9
4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pikir	32
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35

C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Populasi dan Sampel	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	52
Tabel 4.3	Karakteristik Berdasarkan Pendidikan	52
Tabel 4.4	Hasil Deskriptif Variabel Penelitian	53
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas	54
Tabel 4.6	Hasil Uji Reabilitas	56
Tabel 4.7	Hasil Uji t	58
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi R ²	61
Tabel 4.9	Hasil Uji F	62

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	44
Gambar 4.2	Hasil Uji Nomalitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1	Output Uji Asumsi Klasik	
Lampiran 2	Output Uji Hipotesis	
Lampiran 3	Kuesioner Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor (Erlina dan Rasdianto, 2013:21). Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Laporan keuangan yang dalam hal ini adalah bentuk dari keadaan operasional suatu organisasi perlu diberikan pandangan yang serius,

karena tidak sedikit pihak yang sangat membutuhkan informasi mengenai Laporan keuangan, oleh sebab itu sebagai penyusun laporan keuangan memiliki tanggungjawab yang besar dalam melakukan penyusunannya.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2014, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dibahas pada penelitian ini, Hal pertama yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Roviyantie (2011) Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Oleh karena itu pentingnya Sumber Daya Manusia dalam mempengaruhi berbasis akrual tersebut, pemerintah pusat dan daerah

perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintahan. Menurut Herlina (2013) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Selain itu penerapan basis akrual juga ditentukan oleh sistem yang digunakan.

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Pemilihan ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung di karenakan pada tahun 2008 BPK RI memberikan opini “Tidak memberikan pendapat”, pada tahun 2013 BPK RI memberikan opini “Tidak Wajar”. Selanjutnya pada Tahun 2014 BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Meskipun opini yang dierikan BPK tersebut baik pada Pemerintah Kabupaten Badung, namun dari pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian interin dan temuan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, opini merupakan keluaran dari sebuah proses pemeriksaan laporan keuangan. Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan

oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atas sebuah laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini sebagai berikut atas LKPD TA 2016 Kabupaten Kepulauan Selayar, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan pencapaian opini WTP pertama, setelah tahun lalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah daerah belum dinyatakan baik, oleh karena itu dilakukannya pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan yang baik dapat menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah daerah untuk menunjukkan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tentang kinerja keuangan pemerintah

daerah yang berjudul "Pengaruh Pengawasan Intern , Kualitas SDM, dan Penerapan Akruwal Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Selayar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar?
3. Apakah penerapan akruwal basis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberi jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada, yang menjadi tujuan penelitian, antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Akruwal Basis terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengambil landasan teori kegunaan informasi dan teori kompetensi yang dikaji di sektor publik, berbeda dengan penelitian sejenis yang dibuktikan secara empiris pada wilayah sektor privat (swasta), sehingga yang menjadi topik menarik dan menambah ruang lingkup penjelasan teori ini adalah kajian teori ini yang dilakukan pada wilayah sektor public.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan ada penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kab. Kep. Selayar untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna dan dapat dijadikan informasi tambahan untuk penelitian sejenis dimassa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengawasan Intern

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan atau objektif tertentu.

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP dalam Faradillah (2013) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat internal yang ditunjuk oleh pejabat daerah dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun tujuan lain dari pengawasan internal yaitu untuk memperoleh informasi yang objektif dari kegiatan yang diawasi. Hasil audit harus dipublikasikan secara meluas kepada masyarakat,

sehingga apa yang disajikan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai keinginan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaannya.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sutrisno (2011: 21) Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sari dkk (2014:32) Kata kualitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan. Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kualitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan penga-laman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa penge-lolaan sumber daya manusia dilakukan

sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Namun saat sekarang banyak sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, tetapi karena sering mengikuti pelatihan dan sebagainya sehingga mampu untuk paham dan mengerti mengenai akuntansi, itu juga dapat dikatakan dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas.

3. Penerapan Akrua Basis

Berdasarkan ragam dan bentuk kelembagaan pengguna informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama yaitu akuntansi perusahaan, akuntansi sosial, dan akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah merupakan akuntansi untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba.

Akuntansi pemerintah Indonesia awalnya menggunakan akuntansi berbasis kas, sedangkan akuntansi pada umumnya menggunakan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas mencatat dan mengakui transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas serta tidak mencatat kewajiban dan aset. Sedangkan akuntansi berbasis akrual mencatat dan mengakui transaksi pada saat terjadinya transaksi serta melakukan pencatatan terhadap kewajiban dan aset.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2007 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian hanya kurang dari 1 %, dari 362 LKPD 284 LKPD memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian hanya diberikan kepada 3 LKPD, tidak wajar sebanyak 19 dan sisanya sebanyak 56 LKPD *disclaimer*.

Menindaklanjuti hal tersebut bulan Januari 2008 Panitia Ad Hoc IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengadakan kunjungan ke departemen dan daerah untuk berdialog secara langsung dengan pejabat yang terkait. Ada lima departemen dan lima daerah atau propinsi yang dikunjungi yaitu: Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, dan Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan lima propinsi yang dikunjungi adalah Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Pada tanggal 6 februari 2008 Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia melaporkan bahwa dalam kunjungan kerja ke departemen dan daerah, PAH IV DPD RI menemui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya penyimpangan dalam administrasi pengelolaan keuangan negara dan daerah
- b. Indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar;
- c. Ketidakhematan penggunaan uang negara dan daerah
- d. Perbedaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Negara

Permasalahan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah yaitu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Hal ini seperti salah satu yang dilaporkan oleh DPD RI. Pegawai pemerintah daerah khususnya bagian keuangan harus paham tentang ciri khas transaksi yang terjadi serta pengaruhnya terhadap rekening – rekening dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang paham tentang hal tersebut. Namun, yang menjadi kendala utama saat ini yaitu masih banyaknya pegawai keuangan pemerintah daerah yang tidak berlatar belakang akuntansi.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu dasar akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Berdasarkan akuntansi akrual pendapatan diakui saat

dihasilkan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Akuntansi ini banyak digunakan oleh perusahaan atau sektor non publik dengan tujuan untuk mencari laba. Basis ini menyediakan perkiraan yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap ekonomi makro, memberikan informasi yang menyeluruh karena arus sumber daya dicatat semuanya.

Sulitnya penerapan akuntansi berbasis akrual ini dapat dilihat dari perbedaan pengakuan item – item yang digunakan dalam akuntansi berbasis kas maupun akrual. Artikel Hamim Mustafa menjelaskan bahwa pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Seperti akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik maupun sosial, memperlihatkan akuntabilitas atas penggunaan seluruh sumber daya dan pengelolaan semua aktiva dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan, menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, lebih akurat dan komprehensif.

4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel ini menggunakan 11 pertanyaan yang diadopsi dari PP nomor 72 tahun 2010 tentang SAP.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30, UU No.17/2003 tentang keuangan negara meliputi laporan realisasi APBN/D, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No.71/2010 adalah digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh

asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan laporan keuangan penting baik pada organisasi swasta maupun pada pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Berdasarkan PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

c. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

d. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian jujur

Informasi digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

5. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Pengawasan Intern , Kualitas SDM, dan Penerapan Akrua Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Permana dan Wiratmaja (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Regresi Linier Berganda dengan menggunakan 74 responden. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Sistem Informasi berpengaruh positif signifikan pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Rahmadani (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda dengan perangkat lunak SPSS bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi, dan sistem

pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Bagi instansi pemerintah dapat ditingkatkan kualitas kredibilitas pengorganisasian keuangan dengan pemanfaatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi menjadi optimal dan sistem pengendalian internal yang dirancang sehingga menghasilkan wilayah keuangan yang dikemukakan pemerintah adalah kualitas.

Iznillah (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi program ganda dengan versi windows spss 17,0 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia dan komitmen pengaruhnya terhadap kesiapan organisasi dalam menerapkan standar akunting berbasis akrual. Sementara variabel teknologi informasi dan variabel komunikasi tidak berpengaruh.

Kristiawati (2015) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Teknik memeriksa validitas data menggunakan metode triangulasi. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pejabat pemerintah daerah umum di lingkungan Kalimantan Barat untuk

memahami apa yang pada dasarnya berdasarkan sistem akuntansi akrual, meski belum sepenuhnya dipahami. Dari temuan dan analisis data, ada beberapa faktor yang paling berperan dalam keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah Kalimantan Barat, yaitu komitmen, sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan, dan Alat Dukungan..

Darmayani dkk (2014), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD), Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Analisis data menggunakan program SPSS versi 18.0. hasil penelitian hipotesis adalah sebagai berikut: Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, Penerapan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, dan Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Hasil uji secara simultan dapat disimpulkan Kualitas SDM, Penerapan SIPKD, dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan.

Dewi dan Mimba (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis kuantitatif serta analisis regresi linear sederhana digunakan sebagai teknik analisis

data. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif dan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Rahayu dkk (2014), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Populasi penelitian ini adalah 39 unit kerja yaitu Sekretaris Provinsi Riau, Dewan Sekretaris Provinsi Riau, dan unit lainnya, untuk dianalisis datanya menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah kompetensi, Sistem Akuntansi Publik, dan Standar Akuntansi Publik berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Publik.

Wulandari dkk (2014), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Dan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pada SKPD Provinsi Riau. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi mempengaruhi Keandalan Laporan Keuangan.

Yensi dkk (2014), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris

pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). Metode pengumpulan data adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Analisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kompetensi manusia sumber daya dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara positif berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel wilayah PT pengendalian internal (internal audit) tidak mempengaruhi kualitas lokal laporan keuangan pemerintah.

Magfiroh (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengendalian Intern Dan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Di Kabupaten Tebo). Teknik analisis data menggunakan uji regresi berganda dengan menggunakan software SPSS versi 20.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal dan sumber daya manusia dalam akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam hal pengelolaan keuangan dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengendalian intern akuntansi yang memadai agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ida Bagus Gede Bayu Permana Dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016) Vol.16.3.	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Teknik analisis data regresi linier berganda	Pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi berpengaruh positif signifikan pada kesiapan penerapan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.
2	Suci Rahmadani (2015) Vol.2 No.2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan

		Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)		keuangan pemerintah daerah. Bagi instansi pemerintah dapat ditingkatkan kualitas kredibilitas pengorganisasian keuangan dengan pemanfaatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi menjadi optimal dan sistem pengendalian internal yang dirancang sehingga menghasilkan wilayah keuangan yang dikemukakan pemerintah adalah kualitas.
3	M Luthfi Iznillah (2015) Vol.2 No. 2	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen	Metode analisis regresi program	Variabel kualitas sumber daya manusia dan komitmen

		Organisasi, Teknologi Informasi, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir)	ganda dengan versi windows spss 17,0	pengaruhnya terhadap kesiapan organisasi dalam menerapkan standar akunting berbasis akrua. Sementara variabel teknologi informasi dan variabel komunikasi tidak berpengaruh.
4	Endang Kristiawati (2015) Vol. VIII No.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat	Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Teknik memeriksa validitas	Ada beberapa faktor yang paling berperan dalam keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrua di pemerintah Kalimantan Barat, yaitu komitmen, sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan, dan alat dukungan..

			data menggunakan metode triangulasi	
5	Made Ayu Darmayani, Nyoman Trisna Herawati, Dan Anantawikrama Tungga Atmaja (2014) Vol.2 No.1	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd), Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng	Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda	Kualitas sdm berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan bagian keuangan setda kabupaten buleleng, penerapan sipkd berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan bagian keuangan setda kabupaten buleleng, dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan bagian keuangan setda kabupaten buleleng. Hasil uji

				secara simultan dapat disimpulkan kualitas sdm, penerapan sipkd, dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan.
6	P. Ayu Ratna Dewi Dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2014) Vol.8 No.3	Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Pada Kualitas Laporan Keuangan	Teknik analisis kuantitatif serta analisis regresi linear sedrhana	Tingkat efektivitas sipkd di pemerintah kota Denpasar termasuk dalam kriteria efektif dan efektivitas penerapan sipkd berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah kota Denpasar.
7	Liza Rahayu, Kennedy, Yuneita Anisma (2014) Vol.1 No.2	Tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	Metode regresi berganda	Kompetensi, sistem akuntansi publik, dan standar akuntansi publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan publik.

		Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada Skpd Provinsi Riau)		
8	Putri Wulandari, Drs. Kennedy, Mm., Ak., Ca Dan Dr. Enni Savitri, Se., Mm., Ak., Ca (2014) Vol.1 No.2	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Dan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pada Skpd Provinsi Riau	Perangkat lunak spss versi 17	Kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal, dan teknologi informasi mempengaruhi keandalan laporan keuangan
9	Desy Sefri Yensi, Dr. H. Amir Hasan Ms, Mm., Ak., Cpa, Ca c, Ca, Dan Yuneita	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi	Analisis menggunakan regresi berganda	Kompetensi manusia sumber daya dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

	Anisma,Se,M.Si .,Ak.,Ca (2014) Vol. 1 No	Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Kuantan Singingi)		secara positif berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel wilayah pt pengendalian internal (internal audit) tidak mempengaruhi kualitas lokal laporan keuangan pemerintah.
10	Anis Magfiroh (2015) Vol. 2 No.2	Pengaruh Pengendalian Intern Dan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Di Kabupaten Tebo).	Teknik analisis data menggun akan uji regresi berganda dengan menggun akan software spss versi 20.0	Variabel pengendalian internal dan sumber daya manusia dalam akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam hal pengelolaan keuangan dengan

				memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengendalian intern akuntansi yang memadai agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

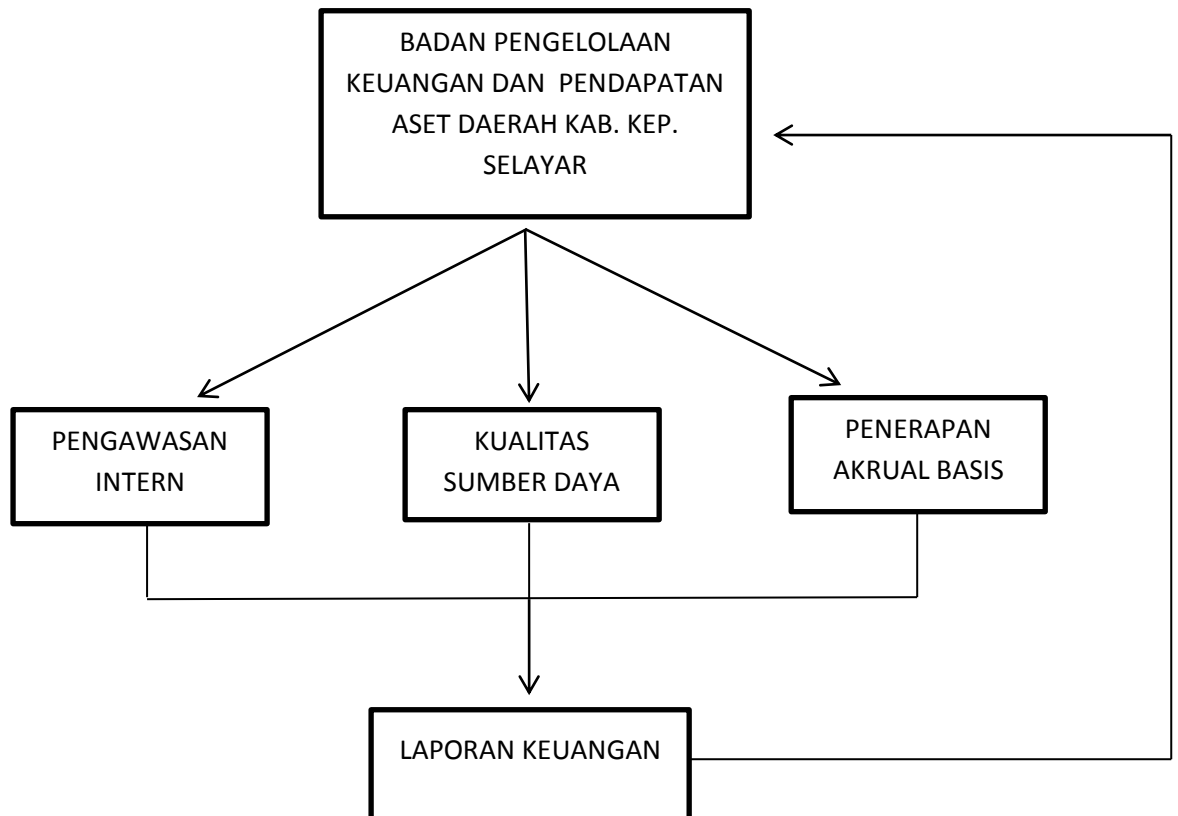
Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang)

Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Danim dalam bukunya "Transformasi Sumber Daya Manusia", sebagai berikut: Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan).

Berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas dan uraian tinjauan pustaka, maka penulis memiliki suatu kerangka pikir mengenai Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas SDM, dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan belum

didasarkan pada fakta2 empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data (Sugiono, 2016:96).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Hubungan Pengawasan Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan utama dari pengawasan internal dalam arti luas ini tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. Dalam struktur organisasi pemerintah Indonesia, fungsi pengawasan internal dalam arti luas diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral Pembangunan (Irjenbang). Dari uraian itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

(H1) : Pengawasan Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hubungan Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Sutaryo (2011), sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi Sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Guy *et al* (2002:67), Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperluka

untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

(H2) : Kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Hubungan Penerapan Akrua Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual diharapkan mampu memberikan manfaat terkait dengan informasi penentuan *cost* dalam rangka program penghematan (*cost saving*) maupun informasi atas aset sehingga mampu memberikan informasi akurat terkait peningkatan pendapatan (*revenue generating*). Implementasi akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, memberikan dasar pengukuran yang lebih baik terkait dampak kebijakan pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasional dan mendorong peningkatan integritas. Kerangka kerja akuntansi berbasis akrual menjadi sangat penting untuk menentukan kos total (*full cost*) aktivitas pemerintah secara sistematis yang pada akhirnya berperan penting dalam pencapaian kerangka kerja manajemen kinerja sektor publik yang lebih efisien dan efektif (Irawan, 2013).

Dari uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

(H3) : Penerapan Akrua Basis berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Indriantoro dan Bambang Supomo (2014: 12) mengemukakan bahwa paradigma penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasi, industri atau perspektif yang lain. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasi), kejadian atau prosedur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa kantor SKPD yang berada di Kab. Kep. Selayar. Waktu penelitian dan pengambilan data dilakukan selama dua bulan.

C. Operasional Variabel

Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang

sama. Dengan demikian iya dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

1. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualits sumber daya manusia adalah Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. Penerapan Akrual Basis

Penerapan akrual basis adalah suatu dasar akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keua ngan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

4. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2011:308) untuk diperoleh data yang

relevan, dapat dipercaya, dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada sampel penelitian yaitu pejabat struktural dan aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Selayar. Kuesioner yang dibagikan oleh peneliti adalah kuesioner dari penelitian sebelumnya (Muhammad Tharmizi Junaid, 2015) dengan judul Pengaruh pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah kota makassar).

2. Interview, yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak terkait yaitu pegawai tetap maupun tenaga honorer pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kab. Kep. Selayar
3. Observasi, dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kab. Kep. Selayar
4. Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat.

E. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitiannya, maka penelitiannya itu merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep.

Selayar sebanyak 47 SKPD sudah termasuk Bagian, Kecamatan dan Kelurahan.

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian/wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden penelitian berupa pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing dinas pada SKPD. Pembatasan obyek penelitian pada dinas didasari aspek kemudahan dalam menjangkau informasi yang dibutuhkan, sehingga diharapkan pengumpulan data mudah, efektif, efisien dan ekonomis dan responden memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan sebanyak 30 SKPD yang sudah termasuk Bagian, Kecamatan, dan Kelurahan.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan (b) *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Cara lain adalah dengan uji statistik *one-simple kolmogorov-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari *one-simple kolmogorov-smirnov* adalah:

- 1) Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

3. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi berganda. Dimana metode analisis ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
b ₀	= Konstanta
X ₁	= Pengawasan Intern
X ₂	= Kualitas SDM
X ₃	= Penerapan Akrua Basis
b ₁ , b ₂ , b ₃	= Koefisien Regresi
e	= Kesalahan (error)

4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen dimana nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya jika R^2 kecil, maka akan semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

5. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kep. Selayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPKPAD Kab. Kep. Selayar.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional”

Misi :

BPKPAD Kab. Kep. Selayar adalah merupakan lembaga/satuan kerja yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati.

BPKPAD Kab. Kep. Selayar sebagai pembina administratif pengelolaan keuangan daerah menjalankan fungsi PPKD yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yang sangat menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Akuntabel atau akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Profesional adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang.

3. Struktur Organisasi

4. *Job Description* (Uraian Tugas)

- a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
- d. Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum.
- e. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- f. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang anggaran.

- g. Sub Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh KepalaSubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjanganggaran daerah.
- h. Sub Bidang Anggaran Desa dipimpin oleh KepalaSubBidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Anggaran melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang anggaran desa.
- i. Sub Bidang Anggaran Bantuan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjanganggaran bantuan keuangan daerah.
- j. Bidang Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang pembiayaan.
- k. Sub Bidang Pengelolaan Kas dipimpin oleh KepalaSubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembiayaan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pengelolaan kas.
- l. Sub Bidang Pengelolaan Gaji dipimpin oleh Kepala SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembiayaan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangpengelolaan gaji.

- m. Sub Bidang Verifikasi Dokumen dipimpin oleh Kepala SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembiayaan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang verifikasi dokumen.
- n. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang akuntansi.
- o. Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang akuntansi.
- p. Sub Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pembukuan.
- q. Sub Bidang Neraca Daerah dipimpin oleh Kepala SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang neraca daerah.
- r. Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang pendapatan.

- s. Sub Bidang Pendapatan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangpendataan dan pendaftaran.
- t. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh KepalaSubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangpenilaian dan penetapan.
- u. Sub Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan dipimpin Kepala oleh SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangpenagihan, pengawasan, dan pelaporan.
- v. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badandalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- w. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis fungsi penunjang pendataan dan pendaftaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- x. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan penilaian dan penetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- y. Sub Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penagihan, pengawasan, dan pelaporan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- z. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan dan pemanfaatan.

- aa. Sub Bidang Penatausahaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang Penatausahaan.
- bb. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pengamanan dan penghapusan.

B. Hasil Penelitian

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mengantar langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kab. Kep. Selayar. Adapun jumlah kuesioner yang dibagikan yaitu sebanyak 40 (rangkap) kuesioner, sedangkan jumlah kuesioner yang kembali adalah 35 (rangkap) kuesioner.

1. Analisis Deskriptif

a. Karakteristik Responden

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada pegawai pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kab. Kep. Selayar sebagai responden, maka dapat diketahui karakteristik setiap responden. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa informasi tersebut dapat menjadi masukan bagi kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Selayar dalam mengetahui

pengaruh pengawasan intern, kualitas SDM, dan penerapan akrual basisi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik/identitas responden dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1) Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang ada pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Aset Daerah Kab. Kep. Selayar dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	18	51,4%
2	Perempuan	17	48,6%
Jumlah		35	100

Sumber : Data primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, maka diperoleh data dari 35 orang responden bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah jenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang responden atau sebesar 48,6% dan responden laki-laki sebanyak 18 orang atau sebesar 51,4%.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tingkat usia responden yang ada pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Aset Daerah Kab. Kep. Selayar, dapat dilihat pada tabel berikut ini

:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	25-35	5	14%
2	36-45	20	58%
3	46-55	5	14%
4	>56	5	14%
Jumlah		35	100

Sumber : Data primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka dapat dilihat bahwa komposisi tingkat usia responden yang terbanyak adalah berada pada tingkat usia 25-35 tahun sebanyak 5 orang responden dengan presentase sebesar 14%, usia 36-45 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 58%, usia 46-55 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 14% dan usia <56 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 14%.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan responden pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Aset Daerah Kab. Kep. Selayar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SMA/SMK	6	17,2%
2	Diploma	4	11,4%
3	S1	20	57,2%
4	S2	5	14,2%
Jumlah		35	100

Sumber : Data Primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 20 orang responden dengan presentase sebesar 57,2%,

disusul oleh responden yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang atau sebesar 14,2%, yang berpendidikan Diploma sebanyak 4 orang atau sebesar 11,4%, kemudian yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 6 orang atau sebesar 17,2%.

- b. Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan Pengaruh pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis terhadap laporan keuangan. Subjek penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kab. Kep. Selayar. Sedangkan obyek penelitian ini berupa variabel yang diuji, yaitu Pengaruh pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia, penerapan akrual basis dan kualitas laporan keuangan.

Tabel 4.4
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics						
	N	Minimu m	Maximu m	Sum	Mean	Std. Deviation
Pengawasan Intern	35	29,00	40,00	1333,00	38,0857	2,80096
Kualitas SDM	35	43,00	55,00	1803,00	51,5143	3,19348
Penerapan Akrual Basis	35	19,00	25,00	830,00	23,7143	1,70762
Kualitas Laporan Keuangan	35	40,00	50,00	1637,00	46,7714	3,02038
Valid N (listwise)	35					

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas, didapatkan informasi sebagai berikut:

Variabel dependen kualitas laporan keuangan, hasilnya memiliki nilai minimum sebesar rata-rata yang dimiliki 46,7714 dengan standar deviasi kualitas laporan keuangan yang dimiliki seluruh sampel sebesar 3,02038. Hal ini menunjukkan tingkat sebaran data kualitas laporan keuangan mempunyai tingkat variasi sebesar 3%. Dikarenakan tingkat variasi <100%, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Hasil pengujian validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan skor total yang dapat dilihat pada nilai *pearson correlation*, apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,3 maka indikator tersebut dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Hasil uji validitas

variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengawasan Intern	X1.1	0,783	0,334	Valid
	X1.2	0,705	0,334	Valid
	X1.3	0,701	0,334	Valid
	X1.4	0,813	0,334	Valid
	X1.5	0,743	0,334	Valid

	X1.6	0,756	0,334	Valid
	X1.7	0,756	0,334	Valid
	X1.8	0,855	0,334	Valid
Kualitas SDM	X2.1	0,277	0,334	Valid
	X2.2	0,613	0,334	Valid
	X2.3	0,689	0,334	Valid
	X2.4	0,399	0,334	Valid
	X2.5	0,704	0,334	Valid
	X2.6	0,660	0,334	Valid
	X2.7	0,437	0,334	Valid
	X2.8	0,639	0,334	Valid
	X2.9	0,580	0,334	Valid
	X2.10	0,523	0,334	Valid
	X2.11	0,678	0,334	Valid
Penerapan akrual basis	X3.1	0,716	0,334	Valid
	X3.2	0,769	0,334	Valid
	X3.3	0,677	0,334	Valid
	X3.4	0,755	0,334	Valid
	X3.5	0,823	0,334	Valid
Laporan keuangan	Y1	0,592	0,334	Valid
	Y2	0,447	0,334	Valid
	Y3	0,667	0,334	Valid
	Y4	0,709	0,334	Valid
	Y5	0,676	0,334	Valid

	Y6	0,589	0,334	Valid
	Y7	0,623	0,334	Valid
	Y8	0,652	0,334	Valid
	Y9	0,775	0,334	Valid
	Y10	0,610	0,334	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dimana suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,783	,925	9

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Berdasarkan Tabel 4.6. uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument variabel pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis adalah sebesar $r_{ii} = 0,783$, ternyata memiliki nilai "*Alpha Cronbach*" lebih besar dari 0,600, yang berarti pengawasan intern, kualitas sumber daya

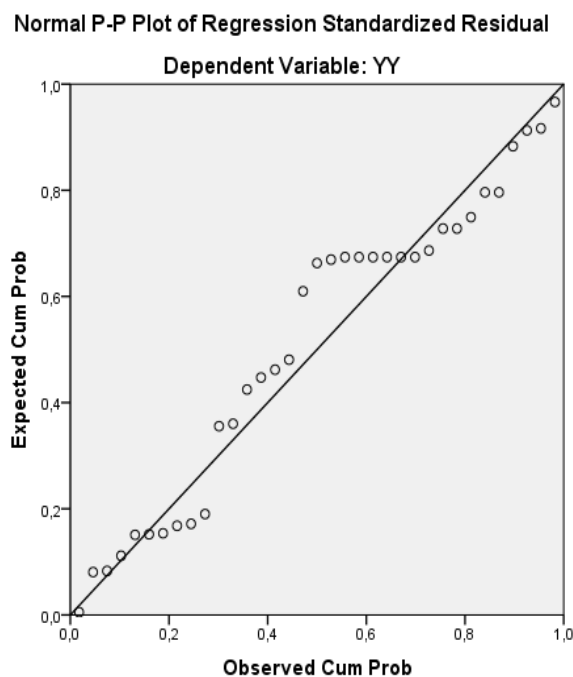
manusia, dan penerapan akrual basis serta kualitas laporan keuangan dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas data dilakukan untuk memenuhi persyaratan model regresi bahwa data yang diperoleh memiliki sifat normal. Suatu data dikatakan terdistribusi normal jika sebaran data yang ada menyebar merata ke sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang ditunjukkan pada gambar Normal Probability Plot. Hasil dari pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model data ini memenuhi asumsi normalitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variable pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis terhadap laporan keuangan. Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel berdasarkan tingkat signifikan 0,05 dan 2 sisi derajat kebebasan $df (n-k-1) = (31-2-1) = 28$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable independen), sehingga t-tabel yang diperoleh dari tabel statistik adalah sebesar 2,048. Apabila $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, sedangkan apabila $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,816	5,988		1,305	,201
Pengawasan Intern	,088	,166	,081	,530	,600
Kualitas SDM	,314	,160	,332	1,957	,059
Penerapan Akrual Basis	,820	,259	,463	3,166	,003

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22,2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 7,816 + 0,088 X_1 + 0,314 X_2 + 0,820 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y	= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
X1	= Pengawasan Intern
X2	= Kualitas Sumber Daya Manusia
X3	= Penerapan Akrual Basis
a	= Konstanta
b1, b2, b3	= Koefisien regresi
e	= Standar error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar 7,816 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis) adalah nol maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terjadi sebesar 7,816.
- 2) Koefisien regresi variabel pengawasan intern (X_1) sebesar 0,088 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengawasan intern akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,088.
- 3) Koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia (X_2) sebesar 0,314 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,314.

- 4) Koefisien regresi variabel penerapan akrual basis (X_3) sebesar 0,820 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel penerapan akrual basis akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,820.

b. Pengujian Hipotesis

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_1 , H_2 dan H_3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H_1)

Berdasarkan tabel 4.7 Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar. Hasil analisis dengan menggunakan *SPSS 22* menunjukkan bahwa nilai *p value* hasil perhitungan pengawasan intern (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,600 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *p* 0,036 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 ($0,600 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1 terhadap Y .

- 2) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H_2)

Berdasarkan tabel 4.7 Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar. Hasil analisis dengan menggunakan *SPSS 22* menunjukkan bahwa nilai *p value* hasil perhitungan kualitas sumber daya manusia (X_2) terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,059 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai p 0,000 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 ($0,059 < 0,05$).

3) Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H_3)

Berdasarkan tabel 4.7 Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan akrual basis terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 22 menunjukkan bahwa nilai p *value* hasil perhitungan penerapan akrual basis (X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,003 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai p 0,001 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 ($0,003 < 0,05$).

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) merujuk pada kemampuan variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Nilai R koefisien determinasi berkisar diantar nol sampai dengan satu. Jomponen-komponen yang terkait dengan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *model summary* dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,769 ^a	,591	,552	2,02197

a. Predictors: (Constant), X.3, X.1, X.2

b. Dependent Variable: YY

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Hasil uji koefisien determinasi dari tabel 4.8 nilai Adjusted R² sebesar 0,591 atau 59,1%. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan mampu dijelaskan oleh variabel pengawasan intern, kualitas SDM, dan penerapan akrual basis sebesar 59,1% sedangkan sisanya 40,9% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183,432	3	61,144	14,956	,000 ^b
	Residual	126,740	31	4,088		
	Total	310,171	34			

a. Dependent Variable: YY

b. Predictors: (Constant), X.3, X.1, X.2

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22,2018

Diperoleh nilai F-hitung sebesar 14,956 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,005$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern, kualitas SDM, dan penerapan akrual basis berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Pembahasan

Penelitian mengenai hal-hal apa saja yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang melibatkan pengaruh variabel bebas (pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis) terhadap variabel independen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah), dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengawasan intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, dengan pengawasan intern yang optimal maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, pengawasan intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan pengawasan intern yang optimal maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan intern telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dan efektifitas dan efisiensi operasi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu Ponamon (2013). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Manado. Pengawasan intern juga menjadi salah satu faktor signifikan yang memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan temuan BPK-RI atas kurangnya pengawasan intern yang mengindikasikan terjadinya kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kota/daerah di Indonesia.

Menjaga integritas data yang dimiliki agar tetap akurat, konsisten dan mencerminkan kualitas data merupakan tanggung jawab suatu organisasi dalam melaksanakan pengendalian internal terhadap entitasnya tersebut. Selain itu, Ketepatan input dan posting data keuangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam menjamin kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu organisasi. Adanya sistem otorisasi dan pembatasan akses terhadap segala bentuk pemrosesan transaksi oleh pihak yang berwenang akan menjamin data keuangan dalam suatu organisasi tetap aman. Dilaksanakannya perumusan dalam penyusunan kebijakan yang sehat tentang pengawasan intern sangat diperlukan sebagai pendukung penerapan pengawasan intern dalam suatu organisasi. Pada akhirnya, setiap alat ukur dari pengawasan intern yang dilaksanakan secara optimal akan berimplikasi pada peningkatan kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu entitas yang dalam hal ini pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab.Kep. Selayar.

2. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan yang mengisi posisi atau jabatan disebuah instansi pemerintahan maka akan meningkatkan kualitas pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini

menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyadari bahwa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengisi posisi dan jabatan pada bidang pengelolaan keuangan suatu instansi, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu Sukmaningrum (2013) , Novitasari (2014) dan Sinarwati et all (2014). Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing akan dapat menjalankan peranan dan fungsinya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan suatu organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi kedepannya. Kompetensi sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai indikator serta alat ukur suatu pemerintahan dalam menilai seberapa efektif dan efisien melaksanakan tugas dan fungsi oleh sumber daya manusia dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi atau keuangan akan dapat mendorong terwujudnya penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pada akhirnya, sumber daya manusia bagian akuntansi atau keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya di pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar, jika telah memenuhi unsur kualitatif (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) yang memadai maka akan berdampak

pada peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Kab. Kep. Selayar.

3. Pengaruh Penerapan Akrua Basis terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa penerapan akrual basis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya dengan menerapkan basis akrual setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan variable yang berpengaruh signifikan dikarenakan standar akuntansi berbasis akrual merupakan standar yang dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas dibandingkan standar yang lama. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif penelitian ini, sebagian besar responden sepakat untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan dengan menggunakan SAP yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christanti (2015) yang menemukan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan

ketentuan, menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik sehingga mampu meningkatkan keterandalan laporan keuangan.

Meskipun dari pengamatan peneliti ternyata di beberapa SKPD yang terdapat di pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar masih banyak pegawai yang belum mengerti bahkan tidak mengerti tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual namun seharusnya dengan keterbatasan pengetahuan para pegawai tentang SAP berbasis akrual, para pegawai harus diberikan pelatihan terhadap pelaporan keuangan lebih sering lagi. Agar semua pegawai memperoleh pengetahuan yang lebih tentang SAP berbasis akrual dan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Sehingga, menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik terkhusus pada pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel independen yaitu pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis terhadap berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan pengawasan intern yang efektif dan efisien, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta penerapan akrual basis yang baik akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan intern berpengaruh bahwa pengawasan internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan pengawasan intern yang optimal maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan intern telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dan efektifitas dan efisiensi operasi.

3. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan yang mengisi posisi atau jabatan di sebuah instansi pemerintahan maka akan meningkatkan kualitas pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Penerapan akrual basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dikarenakan standar akuntansi berbasis akrual merupakan standar yang dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas dibandingkan standar yang lama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil dan beberapa keterbatasan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya lebih memperluas populasi dan sampel penelitian untuk meneliti di beberapa kabupaten/kota sehingga terhadap hasil yang diperoleh dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan lebih representatif.
2. Pemerintah daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar, diharapkan untuk lebih meningkatkan kompleksitas penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi karakteristik kualitatif

seperti yang disebutkan dalam PP No. 71/2010 yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, perkembangan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, internal audit serta variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiani, Sulani. (2010). *Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Simposium Nasional XII*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Darmayani, M.A., dkk. 2014, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan*
- Dewi, P.A.R., Mimba, N.P.S.H 2014, *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Pada Kualitas Laporan Keuangan*, (Online) Vol.8, No.3, (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8252>, diakses 02 januari 2018)
- Erlina dan Rasdianto, 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*, Medan, Brama Ardian.
- Faradillah, Andi (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Hariyanto, Agus. 2012. *Penggunaan Basis AkruaI Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi*. Dharma Ekonomi. No.36
- Husna, Fadhillah. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Padang Panjang)*.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta
- Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Melalui <http://www.bpk.go.id>
- Iznillah, M.L. 2015, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir)*, (Online), Vol.02, No.02, <https://media.neliti.com/media/publications/34086-ID-pengaruh-kualitas->

sumber-daya-manusia-komitmen-organisasi-teknologi-informasi-da.pdf, diakses 02 januari 2018)

- Kristiawati, E. 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat*, (Online), Vol.2, No.2, (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/2771>, diakses 02 januari 2018)
- Magfiroh, A. 2015, *Pengaruh Pengendalian Intern Dan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Di Kabupaten Tebo)*, (Online) Vol. 2, No.2, (<https://media.neliti.com/media/publications/33971-ID-pengaruh-pengendalian-intern-dan-sumber-daya-manusia-bidang-akuntansi-terhadap-k.pdf>, diakses 02 januari 2018)
- Nurillah, Syifa, As. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1,No.1.Hal: 2337-3806.
- Permana, I.B.G.B., Wiratmaja, I.D.N. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*, (Online), Vol.16, No.3, (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20639/15412>, diakses 02 januari 2018)
- Rahayu, L., dkk. 2014, *Tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada Skpd Provinsi Riau)*, (Online) Vol.1, No.2, (<https://media.neliti.com/media/publications/33419-ID-pengaruh-kompetensi-sumber-daya-manusia-sdm-penerapan-sistem-akuntansi-keuangan.pdf>, diakses 02 januari 2018)
- Rahmadani, S. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)*, (Online), Vol.2 no.2, (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/9740/9404>, diakses 02 januari 2018)
- Romilia, Riana. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Bangkalan*. Skripsi. STIE Perbanas, Surabaya.

- Sari, Novita, Lusi. *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan peran auditor internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten kerinci)* 2014.
- Sutrisno, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Soimah, Siti. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Skripsi. Universitas Bengkulu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd), Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng*, (Online) Vol.2, No.1, (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/2960/2454>, diakses 02 januari 2018)
- Wulandari,P. dkk. 2014, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Dan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pada Skpd Provinsi Riau*, (Online) Vol.1 No.2, (<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/download/2331/2292>, diakses 02 januari 2018)
- Wati, dkk. 2014. *Pengaruh Sdm, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi*. Vol.2, No.1. Universitas Pendidikan Ganesha
- Yaya, R., dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yensi, D.S., Hasan, A., Dan Anisma, Y. 2014, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Kuantan Singingi)*, (Online) Vol.1, No.1, (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/4593>, diakses 02 januari 2018)
- Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se- Sumatera Barat)*. Vol.1, No.1..
- Yosefrinaldi, 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan*

Aset Daerah Se-Sumatra Barat). Artikel . Universitas Negri Padang.
Padang.

L

A

M

P

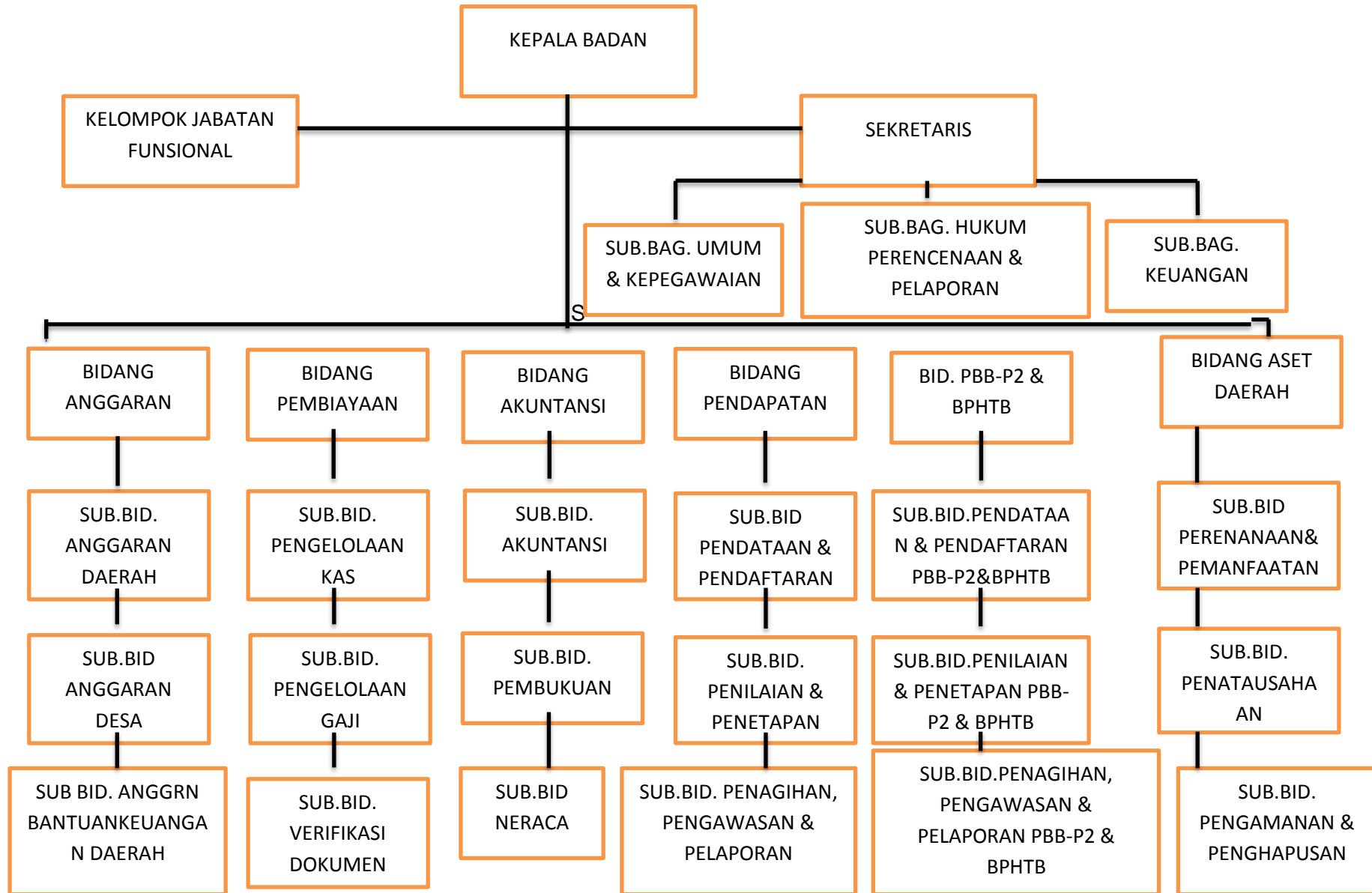
I

R

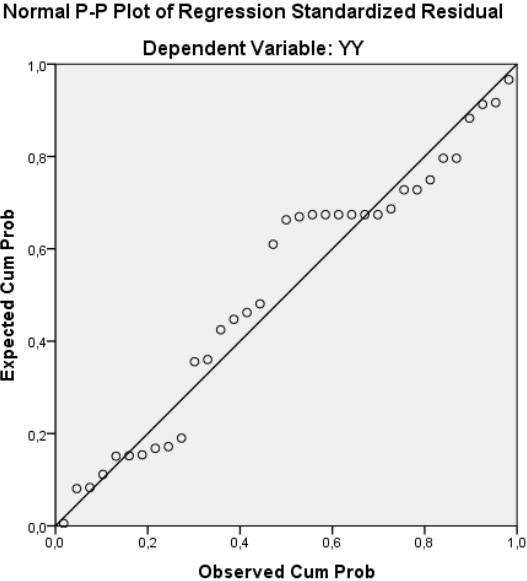
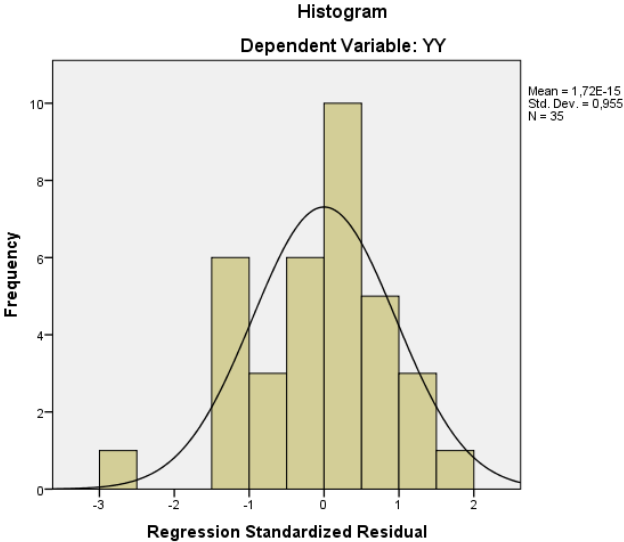
A

N

STRUKTUR ORGANISASI
BPKPAD KAB. KEP. SELAYAR



Output Uji Asumsi Klasik



Output Uji Hipotesis

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X.3, X.1, X.2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: YY

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,769 ^a	,591	,552	2,02197

a. Predictors: (Constant), X.3, X.1, X.2

b. Dependent Variable: YY

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183,432	3	61,144	14,956	,000 ^b
	Residual	126,740	31	4,088		
	Total	310,171	34			

a. Dependent Variable: YY

b. Predictors: (Constant), X.3, X.1, X.2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,816	5,988		1,305	,201
	X.1	,088	,166	,081	,530	,600
	X.2	,314	,160	,332	1,957	,059
	X.3	,820	,259	,463	3,166	,003

a. Dependent Variable: YY

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	39,4361	49,0877	46,7714	2,32272	35
Residual	-5,18100	3,69789	,00000	1,93071	35
Std. Predicted Value	-3,158	,997	,000	1,000	35
Std. Residual	-2,562	1,829	,000	,955	35

a. Dependent Variable: YY

KUESIONER PENELITIAN

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN, KUALITAS SDM, DAN
PENERAPAN AKRUAL BASIS TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. KEP. SELAYAR**



Peneliti :

WIDYA AMRIANI

NIM : 105730502714

(Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN, KUALITAS SDM, DAN PENERAPAN AKRUAL
BASIS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Kepada Yth:

Bapak / Ibu / Saudara(i) Responden

di-

t e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi demi memperoleh gelas sarjana ekonomi (S.E) jurusan akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk tanggapan terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai topik **“Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas SDM, Dan Penerapan Akrua Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Adapun pengumpulan data dari kuesioner ini semata-mata hanya digunakan untuk keperluan akademis dan penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semua data dalam kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.

Kesediaan dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan dalam bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Selain itu, jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis pada khususnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Selayar pada umumnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Makassar, Maret 2018

Hormat saya,

Peneliti

A. DATA IDENTITAS RESPONDEN

1. No. Responden :(Diisi oleh peneliti)
2. Nama (boleh tidak diisi) :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Usia : <25 Tahun 25-35 Tahun 36-45 Tahun
 46-55 Tahun >55 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : SMU D-3 S-1
 S-2 S-3
6. Jabatan : Kepala Dinas/Bagian/Sub Bagian
 Staf/Pegawai
7. Lama Bekerja : <1 Tahun 1-5 Tahun 6–10 Tahun
 11-15 Tahun 16-20 Tahun 21-25 Tahun
 26-30 Tahun >31 Tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya..
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternatif jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu/Saudara(i) pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut :

Simbol	Kategori	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
R	Ragu/Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

I. PENGAWASAN INTERN

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Lingkungan pengendalian sangat berperan dalam terciptanya sebuah laporan yang berkualitas.					
2	Penaksiran risiko menjadi hal yang sangat penting ketika pembuatan pelaporan sedang berlangsung.					
3	Setiap transaksi yang ada harus disertai dengan bukti yang valid.					
4	Melaksanakan pencatatan secara kronologis untuk setiap transaksi keuangan					
5	Melaksanakan proses pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi					
6	Melaksanakan pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan					
7	Informasi dan komunikasi yang baik dinilai mampu menghasilkan sebuah laporan yang berkualitas					
8	Diperlukan adanya pemantauan disemua tahap proses pembuatan laporan.					

II. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/ akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.					
2	Uraian tugas subbagian keuangan/ akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.					
3	Logika akuntansi digunakan untuk menganalisis transaksi dalam penyajian laporan keuangan					
4	Laporan keuangan disajikan sesuai dengan siklus dan periode akuntansi					
5	Kemampuan membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
6	Memiliki kecakapan dan keterampilan dalam menganalisis transaksi dan mengolah laporan keuangan					
7	Terdapat paling tidak 30 Persen lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi					
8	Sering terlibat dan ikut serta dalam pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai.					
9	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai membantu dalam penguasaan dan pengembangan keahlian untuk menyelesaikan tugas sehari-hari					
10	Ikut serta dalam sosialisasi atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai apabila dilaksanakan sosialisasi peraturan baru tentang keuangan daerah					

11	Memiliki pemahaman tentang struktur organisasi tempat kerja.					
----	--	--	--	--	--	--

III. PENERAPAN AKRUAL BASIS

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Teknologi informasi yang memadai mendukung jalannya penerapan akrual basis sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SAP.					
2	Adanya pelatihan mengenai sistem akuntansi berbasis akrual dinilai mampu membantu menerapkan sistem tersebut.					
3	Konsultan dinilai mampu untuk memberikan bantuan untuk berjalannya proses penerapan SAP berbasis akrual.					
4	Adanya pengalaman ketika menerapkan SAP basis kas menuju akrual dinilai mampu menerapkan SAP basis akrual secara full.					
5	Satuan kerja sangat berperan dalam proses pembuatan laporan yang berbasiskan akrual.					

IV. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.					
2	Laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.					
3	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan yaitu lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.					
4	Penyajian/penerbitan laporan keuangan tepat pada waktunya sesuai periode akuntansi.					
5	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan yaitu jujur (apa adanya) sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.					
6	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.					
7	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat akurat yang didukung oleh bukti transaksi.					
8	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan informasi pada laporan keuangan sebelumnya.					
9	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan bersifat netral.					
10	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna laporan.					